

Strengthening Potential Sectors, Growth Centers, and Regional Financial Capacity in Efforts to Increase Economic Growth in West Sumba Regency

Sisilia Arista Bili

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Email: sisilia.arista.1804326@students.um.ac.id

Agus Sumanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Email: agus.sumanto.fe@um.ac.id

Keywords:

Underdeveloped Regions, Economic Growth, Potential Sector, Facilities and Accessibility, Growth Center, Regional Finance

Abstract

This study aims to find out in detail the cause of an area being categorized as a disadvantaged area (3T). The object of this research is West Sumba Regency, which is one of the underdeveloped areas of the 22 regencies/cities in NTT. The type of data used is secondary data sourced from BPS publications and West Sumba Regency APBD data for the 2016-2020 period. This study uses six analytical techniques, four of which are SLQ, DLQ, Shift Share, and Klassen Typology which are then overlaid to find out which sectors are the leading economic sectors and have potential in the future. Scalogram analysis to determine the area that is the center of growth based on its facilities and accessibility. Regional Financial Analysis to find out how much the government is able to manage regional financial resources autonomously. The results showed that there were only 3 basic sectors while the other 11 entered as potential sectors. Waikabubak City and Wanokaka District are the areas with the highest growth centers during the 2016-2020 period. Based on regional financial analysis with 4 indicators that have been calculated, it shows that all of them are in the very less and less category with an instructive relationship pattern. This means that the level of dependence of the West Sumba district on the central government and other external parties is still very high in the 2016-2020 period.

Kata Kunci

Daerah Tertinggal, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Potensial, Fasilitas dan Aksesibilitas, Pusat Pertumbuhan, Keuangan Daerah.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara terperinci penyebab suatu daerah masuk dalam kategori sebagai daerah tertinggal (3T). Objek dalam penelitian ini yakni Kabupaten Sumba Barat yang merupakan salah satu daerah tertinggal dari 22 kabupaten/kota di NTT. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS dan Data APBD Kabupaten Sumba Barat periode tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan enam teknik analisis, empat diantaranya yaitu SLQ, DLQ, Shift Share, dan Typologi Klassen yang kemudian digabung (overlay) untuk mengetahui sektor mana saja yang merupakan sektor ekonomi unggulan dan potensial dimasa depan. Analisis Skalogram untuk mengetahui wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan fasilitas dan aksesibilitasnya. Analisis Keuangan Daerah untuk mengetahui seberapa besar pemerintah mampu mengelola sumber keuangan daerah secara otonom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 3 sektor basis sedangkan 11 lainnya masuk sebagai sektor potensial. Kota Waikabubak dan Kecamatan Wanokaka merupakan wilayah dengan pusat pertumbuhan tertinggi selama periode 2016-2020. Berdasarkan analisis keuangan daerah dengan 4 indikator yang telah dihitung menunjukkan bahwa semuanya berada di kategori sangat kurang dan kurang dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti tingkat ketergantungan kabupaten Sumba Barat kepada pemerintah pusat dan pihak luar lainnya masih sangat tinggi pada periode tahun 2016-2020.

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan inti dari penyelenggaraan pemerintahan setiap negara. Isu mengenai kesejahteraan masyarakat bukan hanya sekedar isu nasional melainkan sudah menjadi isu global sejak lama. Upaya nyata yang pernah dilakukan pemerintah secara global salah satunya adalah melalui kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai *Millenium Development Goals (MDGs)* yang disahkan pada tanggal 14-15 september tahun 2000 dan berlaku hingga tahun 2015 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) milenium bertempat di *New York*, Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah sosial di tahun 2015 sampai separuh dari kondisi 2005. Untuk menindaklanjuti hal ini maka PBB membuat kesepakatan baru sebagai agenda lanjutan dari MDGs yang disebut sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan pada 25 september 2015 Tujuannya berubah bukan hanya sekedar mengurangi melainkan menghilangkan masalah sosial ekonomi sampai tidak ada satu warga pun yang tertinggal dengan 169 target dan 193 anggota seperti yang kenal hingga saat ini karena masih terus berjalan hingga tahun 2030 (Kroll et al., 2019)

Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang terlibat dalam pengesahan dan penandatanganan SDGs dalam rangka mendukung pembangunan global. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menggunakan nawacita sebagai landasan dan arahan utama dalam penetapan RPJM tahun 2015-2019 dan RPJM tahun 2020-2024 dimana isi dari nawacita sendiri selaras dengan tujuan pembangunan yang terdapat dalam pembangunan global SDGs. Namun hingga tahun 2020 permasalahan besar yang masih dihadapi Indonesia adalah masih banyak daerah kota/kabupaten yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Hal ini ditetapkan dalam perpres 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal. Jumlah daerah tertinggal di Indonesia tercatat sebanyak 62 daerah yang semuanya tersebar di berbagai provinsi di luar pulau Jawa yakni

pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua (Bappenas.go.id). Definisi daerah tertinggal merupakan daerah yang kabupaten/kotanya masih kurang berkembang atau masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala yang lebih besar. Dalam perpres no 63 tahun 2020 juga dijelaskan bahwa suatu daerah atau wilayah dikatakan tertinggal dilihat beberapa kriteria berikut: perekonomian masyarakat yang masih tertinggal, rendahnya kualitas SDM, ketidaklengkapan sarana prasarana, rendahnya kemampuan keuangan daerah, susah aksesibilitas, dan karakteristik tertentu yang dimiliki daerah tersebut (Perpres No 63 tahun 2020).

NTT merupakan provinsi yang dianugerahi potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan di masa pandemi covid 19 ketika pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, beberapa sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan administrasi pemerintah masih merupakan sektor yang dapat bertahan dan memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian NTT (Kajian Fiskal Regional NTT 2020). Meski memiliki kekayaan SDA yang sangat potensial untuk dikembangkan NTT masih tetap merupakan salah satu provinsi yang kabupaten/kotanya banyak masuk dalam daerah tertinggal (3T). Hal ini ditetapkan dalam perpres no 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki total 156 kabupaten yang tergabung dalam 12 provinsi dimana sebesar 58% dari total tersebut masuk ke dalam kategori dan berstatus sebagai daerah tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian, SDA, sarana-prasarana, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas berada di bawah nilai rata-rata atau rendah dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia (Anindikasari et al., 2020)

Berikutnya berbagai upaya juga terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumba Barat untuk terus membangun berbagai sarana prasarana untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sejumlah pembenahan terus dilakukan karena sarana-prasarana masih sangat kurang. Hal ini juga tertuang dalam RPJMD kabupaten Sumba Barat periode 2016-2021 tentang ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas. Beberapa upaya tersebut telah berhasil terealisasi namun belum sepenuhnya (RPJMD 2016-2021). Faktor berikutnya adalah kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya pada periode tahun 2011-2015 hasil perhitungan Rasio kemandirian keuangan daerah pada periode tersebut menunjukkan jumlah rata-rata sebesar 6,8% dengan pola instruktif. Hal ini berarti kemampuan keuangan daerah Sumba Barat masih sangat bergantung dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman sehingga dianggap belum mampu untuk membiayai pengeluaran daerah sendiri. Kontribusi PAD terhadap APBD pada periode tersebut hanya sebesar 6,97%. Angka ini tergolong sangat rendah tetapi merupakan angka tertinggi Sumba Barat pada saat itu (Ndaparoka, 2018).

Atas dasar uraian latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu daerah tertinggal di NTT. Penelitian ini menggunakan analisis sektor unggulan seperti *Shift-Share*, SLQ dan DLQ, *Typologi Klassen*, kemudian digabungkan menggunakan Analisis *Overlay*. Berikutnya menggunakan Analisis Skalogram untuk melihat dan menentukan pusat pertumbuhan di kabupaten Sumba Barat. Analisis terakhir menggunakan perhitungan Rasio Kemandirian Daerah untuk melihat Kemampuan Keuangan Daerah Sumba Barat. Kemudian dari hal ini dapat ditarik kesimpulan dan solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan ekonomi di Sumba Barat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pembangunan Ekonomi

Kemajuan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari proses panjang dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional negara tersebut. Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bisa menciptakan keserasian, keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh sebagai satu kesatuan, serta pembangunan yang merata. (Purba et.,al 2021) Keterlibatan yang saling mendukung antar pemerintah dan masyarakat merupakan kunci penting dalam suksesnya pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan yang baik ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi, menciptakan berbagai alternatif kemudahan, berbagai perubahan menuju arah yang lebih baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik, semakin tingginya nilai-nilai dalam kebersamaan, dan yang paling penting adalah meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang diperangi dalam pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan dan kemiskinan. Oleh karena itu sinergitas dari tiga modal kunci yakni modal fisik, manusia, dan alam adalah kunci utama dalam mencapai pembangunan ekonomi nasional yang semakin baik (Hasan & Azis, 2018).

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi tentu saja bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya nilai tambah produksi barang dan jasa (PDRB) yang menyebar secara merata dalam seluruh lapisan masyarakat di suatu daerah. Peningkatan ini juga sekaligus mencerminkan adanya indikasi penurunan atau pengurangan tingkat kemiskinan secara signifikan (Giovanni, 2018). Beberapa hal yang menjadi penekanan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan adalah sebagai berikut: meningkatkan produksi

barang dan jasa, meningkatkan investasi, meningkatkan lapangan kerja untuk peluang dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan tinggi, menurunkan jumlah pengangguran, menciptakan berbagai inovasi, memperhatikan IPTEK, dan meningkatkan daya saing. Inti dari semua hal tersebut adalah terciptanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2015; Hasan & Azis, 2018).

2.3 Sektor Potensial

Setiap daerah tentu memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda-beda, hal inilah yang mendasari lahirnya otonomi daerah agar setiap daerah memiliki kebebasan dalam mengelola seluruh potensi yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah tersebut. Sektor-sektor yang memiliki nilai produksi barang maupun jasa yang tinggi dan bahkan bisa mendatangkan penghasilan dari luar daerah lain disebut sebagai sektor basis/unggulan. (Tarigan, 2005). Dalam beberapa analisis untuk menghitung PDRB terdapat juga sektor-sektor yang disebut sebagai sektor potensial. Oleh karena itu fokus yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sektor basis adalah bagaimana mendorong sektor-sektor potensial menuju sektor basis. Alasannya adalah karena sektor potensial memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi sektor basis, kemudian diikuti dengan pengembangan sektor berkembang menuju potensial dan sektor tertinggal menuju sektor berkembang. Pengelolaan sektor-sektor ini dengan baik dan benar dapat meningkatkan sumbangsi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Basuki & Mujiraharjo, 2017)

2.4 Ketersediaan Sarana Prasarana dan Aksesibilitas

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya maka dibutuhkan faktor pendukung yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Faktor pendukung yang dimaksudkan adalah

kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan sarana-prasarana serta infrastruktur yang memadai. Aksesibilitas yang dimaksud yakni akses-akses untuk mendapatkan makanan yang layak dan bergizi seimbang, akses kelayakan sandang, akses memiliki tempat tinggal/rumah layak huni, akses layanan kesehatan yang memadai, akses untuk pendidikan yang merata, akses hiburan, dan akses hidup layak. Atas dasar hal-hal tersebutlah mengapa pembangunan ekonomi daerah memiliki arti yang sangat penting masyarakat terutama di daerah tertinggal (Wardana, 2016). Faktor pendukung berikutnya adalah ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur. Ketersediaan sarana prasarana dalam berbagai sektor dan bidang seperti di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, energi, menjadi jembatan dalam percepatan pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan perubahan berarti bagi masyarakat terutama bagi masyarakat di pedesaan di daerah tertinggal. (Yonatan et al., 2014).

2.5 Kemampuan Keuangan Daerah

Selain sektor ekonomi, indeks pembangunan manusia, sarana prasarana dan aksesibilitas salah satu cara mengukur kinerja perekonomian suatu daerah secara nyata dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah atau yang bisa dikenal Sebagai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Dari rasio kemandirian keuangan daerah inilah kita dapat melihat seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai seluruh kegiatan yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, maupun berbagai pelayanan dasar dalam masyarakat secara sendiri (Prakoso et al., 2019). Suatu daerah dapat dikatakan memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang baik dengan syarat pendapatan asli daerah (PAD) harus lebih besar daripada bantuan pemerintah pusat, dan pinjaman maupun

bantuan dari pihak eksternal lainnya. Hal ini berarti rasio ketergantungan pemerintah daerah sangat rendah dan bisa membiayai kebutuhannya sendiri dan sebaliknya. Oleh karena itu penting bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut (Wokas, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumba Barat untuk periode tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data PDRB provinsi NTT dan data Produk PDRB kabupaten Sumba Barat tahun 2016-2020, data berbagai sarana-prasarana dan fasilitas masing-masing kecamatan di kabupaten Sumba Barat tahun 2020 yang diambil dari publikasi katalog "Sumba Barat Dalam Angka" dan data APBD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016-2020, yang bersumber dari publikasi BPS. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode analisis sebagai berikut :

3.1 Analisis SLQ dan DLQ

SLQ (*Statistic Location Quotient*) adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat perbandingan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah/ regional dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang sama secara nasional atau daerah yang lebih besar (Tarigan, 2014). Analisis LQ digunakan untuk melihat sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis yang diukur dari seberapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian suatu wilayah. Dari hasil inilah kemudian akan diketahui kemampuan suatu wilayah apakah *net importir* atau *net eksporter*. Berikut merupakan formula untuk menghitung LQ :

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Si merupakan PDRB sektor i wilayah studi. S merupakan total PDRB wilayah studi. Ni

merupakan PDRB sektor i wilayah acuan. N merupakan total PDRB wilayah acuan.

Analisis DLQ (*Dynamic Location Question*) adalah analisis yang diturunkan dari Analisis SLQ, akan tetapi telah dimodifikasi. DLQ mempertimbangkan dan memasukan laju pertumbuhan rata-rata terhadap masing-masing nilai tambah secara sektoral maupun PDRB dari periode waktu tertentu antara tahun 0 sampai tahun t. Manfaat dari analisis ini yaitu membantu pemerintah dalam mengetahui potensi sektor yang akan dijadikan prioritas untuk dikembangkan (Sihombing, 2018)

$$DLQ = \frac{1+Gik)/(1+Gk)}{(1+Gip)/(1+Gp)}$$

DLQ adalah Indeks potensi sektor i di wilayah studi pada masa yang akan datang. Gik merupakan Laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi. Gk merupakan rata-rata laju pertumbuhan sektor di wilayah studi. Gip merupakan laju pertumbuhan sektor i di wilayah acuan. Gp merupakan rata-rata laju pertumbuhan sektor di wilayah acuan. Sedangkan t merupakan selisih tahun akhir dan tahun awal.

3.2. Analisis Shift Share

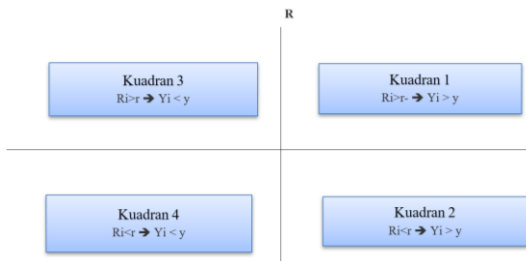
Analisis *Shift share* merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat pergeseran ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi daerah studi atau daerah yang lebih kecil terhadap pergeseran atau laju pertumbuhan ekonomi daerah nasional atau daerah referensi (Putra 2011). Analisis ini sendiri terdiri atas tiga komponen pendukung analisa yakni pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect/national share*), pengaruh bauran industri (*industry mix share/proposional share*), dan pergeseran *diffrentsial share*. Berikut merupakan formula untuk menghitung *Shif share*:

$$Gij = NSij + PSij + DSij$$

3.3. Analisis Typologi Klassen

Menurut Badan Pusat Statistik *Typologi Klassen* merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat pola dan gambaran pertumbuhan ekonomi serta struktur

perekonomian suatu daerah. Hasil analisis ini nantinya kemudian akan digambarkan dalam suatu kuadran dengan dua indikator utama dimana pertumbuhan ekonomi di sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita di sumbu horizontal. Kuadran itu sendiri dibagi menjadi 4 yakni:



Dimana R_i merupakan laju pertumbuhan PDRB di wilayah studi. Y_i merupakan pendapatan perkapita wilayah studi. R merupakan laju pertumbuhan PDRB wilayah acuan. Y merupakan pendapatan perkapita wilayah acuan.

3.4. Analisis Skalogram

Analisis Skalogram merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk menentukan pusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui ketersediaan pusat hingga sub pusat pelayanan secara regional. Hasil analisis ini dapat menggambarkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu wilayah secara terperinci (Filipus et al 2019). Semakin lengkap fasilitas pelayanan yang bisa diberikan maka semakin tinggi tingkatan daerah tersebut sebagai pusat pertumbuhan (Pratomo et al., 2014). Daerah yang memiliki tingkat fasilitas pelayanan yang paling tinggi akan disebut sebagai daerah pusat pertumbuhan sedangkan daerah yang tingkat fasilitas pelayanan nya kurang lengkap disebut sebagai daerah pendukung atau (*hinterland*) (Priyadi & Atmadji, 2017). Berikut merupakan rumus yang digunakan analisis skalogram :

1. Indeks Kapasitas (Aksesibilitas dan Fasilitas)

- **Indeks Aksesibilitas = $B_{ij} = 1/X_{ij}$**

B_{ij} merupakan indeks invers. X_{ij} merupakan nilai data wilayah ke- i variabel ke j .

- **Indeks Fasilitas = $A_{ij} = 1000 \times F_{ij}/p_i$**
 A_{ij} merupakan indeks fasilitas ke- j pada wilayah ke- i . F_{ij} merupakan jumlah fasilitas ke- j di wilayah ke- i . P_i merupakan jumlah penduduk di wilayah ke- i

2. Indeks Pembobotan (Aksesibilitas dan Fasilitas)

- **Bobot** =
$$\frac{n \text{ (jumlah total wilayah)}}{f \text{ (jumlah wilayah yang punya fasilitas)}}$$

- **Bobot indeks penciri = $I_{ij} = A_{ij} \times \text{Bobot}$**
Dimana:

$i = 1, 2, \dots, n \rightarrow$ jumlah wilayah

$j = 1, 2, \dots, n \rightarrow$ jumlah seluruh variabel penciri

I_{ij} = Indeks yang sudah dibobot dengan fasilitas

A_{ij} = Indeks fasilitas ke- j pada wilayah ke- i per 1000 penduduk

3. Indeks Standarisasi (Aksesibilitas dan Fasilitas)

$$\text{Indeks Baku} = K_{ij} = \frac{I_{ij} - \min(I)j}{S_j}$$

K_{ij} merupakan nilai baku indeks hirarki wilayah ke- i dengan ciri ke- j . I_{ij} merupakan nilai bobot indeks penciri wilayah ke- i dan ciri ke- j . $\min(I)$ merupakan nilai minimum indeks pada ciri ke- j . S_j merupakan nilai standar deviasi.

4. Indeks Hirarki (Aksesibilitas dan Fasilitas)

- **Hirarki-1 = $\sum K_{ij} > \text{Rataan}(K_{ij}) + \text{Stdev}(K_{ij})$.**
- **Hirarki-2 = $\text{Rataan}(K_{ij}) < \sum K_{ij} < \text{Rataan}(K_{ij}) + \text{Stdev}(K_{ij})$**
- **Hirarki-3 = $\sum K_{ij} < \text{Rataan}(K_{ij})$**

Dimana $\sum K_{ij}$ = nilai penjumlahan indeks terbobot ; K_{ij} = Hasil perhitungan indeks berbobot. Apabila melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel maka rumusnya menjadi :

$$= \text{if}(\text{REF} > X + \text{stdev}, \text{"Hirarki I"}, \text{if}(\text{REF} > = X, \text{"Hirarki II"}, \text{"Hirarki III"}))$$

3.5 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.

Metode terakhir yang digunakan adalah Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK). Melalui metode ini dapat diketahui secara nyata perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui penilaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan otonomi daerah dimana daerah berhak mengatur dan mengelola keuangannya sendiri melalui menggali berbagai sumber-sumber keuangan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri (Dethan, 2015). Dalam analisis ini terdapat beberapa indikator untuk menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) mendapatkan gambaran secara lebih terperinci dan nyata diantaranya adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun 2015-2020 (Bappenas, 2003). Berikut merupakan formula untuk menghitung Indeks Keuangan Daerah :

1). Rumus Rasio Kemandirian Daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah (Pusat) + Pinjaman}} \times 100\%$$

2). Rumus Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total bantuan pemerintah (Pusat) / Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3). Rumus Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Ket :

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah (PAD pada tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t

4). Indeks Kemampuan Rutin

$$\text{Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Sektor Unggulan dan Potensial Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan hasil analisis SLQ dana DLQ, *Shift Share* dan *Typologi Klassen* yang kemudian digabungkan (*overlay*), berikut merupakan ringkasan tabel hasil analisis *overlay* :

Tabel 1: Hasil Perhitungan berdasarkan analisis *Overlay* di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Sektor	Teknik Analisis				Keterangan
	Cabutan SLQ dan DLQ	Shift Share	Typologi Klassen	Overlay	
A. Pertanian Kehutanan dan Perikanan	-	-	-	-	Non Unggulan
B. Pertambangan dan Pengalihan	-	+	+	-	Non Unggulan
C. Industri Pengolahan	+	+	+	+++	Unggulan
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-	+	+	-	Non Unggulan
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	+	+	-	-	Non Unggulan
F. Konstruksi	+	-	-	-	Non Unggulan
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	-	+	-	Non Unggulan
H. Transportasi dan Perhubungan	+	+	-	-	Non Unggulan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	-	-	-	Non Unggulan
J. Informasi dan Komunikasi	-	+	-	-	Non Unggulan
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	+	+	+	+++	Unggulan
L. Real Estate	+	-	-	-	Non Unggulan
M. N. Jasa Perusahaan	-	-	-	-	Non Unggulan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	+	+	-	Non Unggulan
P. Jasa Pendidikan	-	-	-	-	Non Unggulan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	+	+	+++	Unggulan
R, S, T, U. Jasa lainnya	+	-	+	-	Non Unggulan

Berdasarkan hasil analisis *overlay* diatas dapat diketahui bahwa hanya terdapat 3 sektor yang menjadi sektor basis atau unggulan di kabupaten Sumba Barat yakni sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini dikarenakan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan catatan BPS menunjukkan sektor industri mengalami perkembangan yang cukup baik yakni jumlah perusahaan industri mikro

dan kecil mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 3.432 perusahaan, meningkat menjadi 6.203 pada tahun 2019 dan sedikit menurun namun tidak terlalu tajam menjadi 6.179 pada tahun 2020.

Sedangkan pendapatan dan pengeluarannya pada tahun 2018 mencapai pendapatan sebesar Rp. 179.257.705 dan pengeluaran sebesar Rp.78.799.072. kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi pendapatan sebesar Rp.83.102.148 dan pengeluaran sebesar Rp.38.352.381. Kembali meningkat pada tahun 2020 yakni pendapatan sebesar Rp. 111.192.291 dan pengeluaran sebesar Rp. 42.793.701. Sedangkan Jumlah tenaga kerja di sektor industri makro dan kecil mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 4.198 jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10.544 jiwa pada tahun 2019 dan 10.362 jiwa pada tahun 2020. Sektor berikutnya adalah jasa keuangan asuransi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya.

Berdasarkan catatan BPS kabupaten Sumba Barat menyebutkan bahwa sektor jasa memang memiliki perkembangan yang cukup stabil dan positif dalam kurun 5 tahun terakhir. Terhitung semenjak tahun 2017 sampai 2020 kontribusi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berturut-turut sebesar 5,07%; 5,06%; 5,00%; dan 5,47%. Sedangkan untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial kontribusinya tidak terlalu menonjol namun relatif stabil dibandingkan dengan sektor lainnya. Semenjak tahun 2017 hingga 2020 berkisar antara 1% sampai 2%. Berdasarkan analisis tersebut maka dengan ada nya peran otonomi daerah Kabupaten Sumba Barat dapat melakukan peningkatan dalam pengembangan sektor-sektor yang mengarah pada penyediaan tenaga kerja.

Sektor Industri Pengolahan merupakan salah sektor yang memiliki pertumbuhan yang baik sehingga sangat berpotensi dalam ekspor serta berpeluang dalam peningkatan tenaga kerja. Sedangkan kedua sektor jasa lainnya merupakan sektor yang cukup membantu dalam menjaga kestabilan perekonomian di

tenang situasi dan kondisi yang tdk menentu, karena kedua sektor ini merupakan sektor yang tidak terlalu terganggu meskipun perekonomian dilanda guncangan. Oleh karena itu penting untuk mempertahankan sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sumba Barat (Prahardika, 2015) Namun berdasarkan hasil ketiga analisis yakni SLQ dan DLQ yang diambil dari tipe 2 atau sektor yang berpeluang untuk bereposisi menjadi sektor basis dalam matriks gabungan SLQ dan DLQ dimana nilai $SLQ < 1$ sedangkan $DLQ > 1$.

Kriteria	$DLQ \geq 1$	$DLQ < 1$
$DLQ < 1$	Tipe I Basis C, G, K, dan L.	Tipe III Reposisi Non-Basis O dan P
$LQ < 1$	Tipe II Reposisi Basis B, E, F, H, I, Q, R, S, T, dan U	Tipe IV Non-Basis A, D, J, M dan N

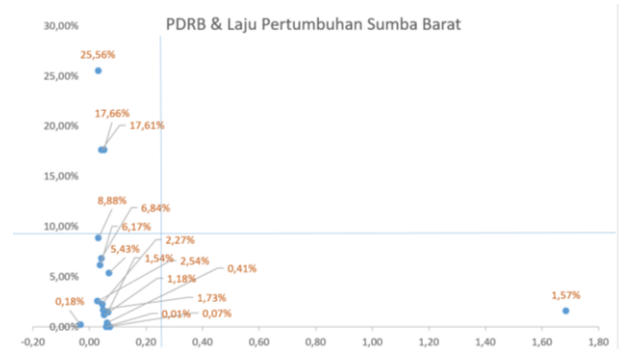
Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sektor-sektor yang masuk ke dalam Tipe 1 yakni sektor basis tetap di kabupaten Sumba Barat adalah 1). Industri Pengolahan 2). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. 3).Jasa Keuangan dan Asuransi. 4). Real Estate. Hal ini dikarenakan berdasarkan perhitungan sektor-sektor tersebut memiliki nilai SLQ dan DLQ lebih dari satu ($SLQ \geq 1$ dan $DLQ \geq 1$). Hal ini berarti menunjukkan kinerja di sektor-sektor tersebut cukup baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kemungkinan di masa yang akan datang sektor-sektor tersebut tidak mengalami reposisi dan menjadi sektor basis yang tetap. Berikutnya berdasarkan analisis Shift Share yang diambil dari sektor yang tergolong sebagai sektor yang maju atau progresif yakni yang hasil perhitungan gaji nya positif.

SEKTOR	KETERANGAN
1. Pertambangan dan Penggalian	Sektor Maju/Progresif
2. Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.	Sektor Maju/Progresif
3. Transportasi dan Pergudangan.	Sektor Maju/Progresif
4. Informasi dan Komunikasi.	Sektor Maju/Progresif
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	Sektor Maju/Progresif

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel klasifikasi diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 sektor yang masuk dalam klasifikasi sektor maju atau progresif yakni Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sebanyak 6 sektor masuk dalam sektor lamban/mundur yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa lainnya. Berikutnya berdasarkan analisis typologi Klassen yang diambil dari sektor-sektor yang masuk dalam kategori kuadran 2 atau sektor potensial:



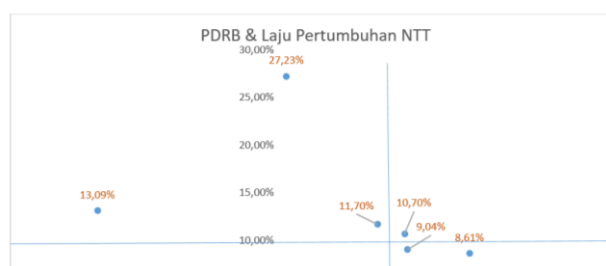
Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang termasuk dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berikut merupakan klasifikasi hasil dari pengolahan analisis typology Klassen antara provinsi NTT sebagai wilayah acuan dan Kabupaten Sumba Barat sebagai wilayah studi.

Tabel 5 : Kuadran Typologi Klassen

Kuadran 3 $R_i > r \rightarrow Y_i < y$	Kuadran 1 $R_i > r \rightarrow Y_i > y$
Kuadran III (Sektor maju tapi tertekan) B, F, H, I, J, L, P	Kuadran I (Sektor maju dan tumbuh pesat) C, G, K, O.
Kuadran 4 $R_i < r \rightarrow Y_i < y$	Kuadran 2 $R_i < r \rightarrow Y_i > y$
Kuadran III (Sektor maju tapi tertekan) A, E, M, N	Kuadran II (Sektor Potensial) D, Q, R, S, T, U

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022



Dari kuadran yang telah disatukan tersebut didapatkan sektor-sektor yang

termasuk dalam sektor potensial yakni sektor yang masuk ke dalam kuadran 2. Sektor-sektor tersebut meliputi Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisa sektor-sektor ini merupakan sektor-sektor usaha dengan potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik di kabupaten Sumba barat untuk meningkatkan kontribusi dan sumbangsinya terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumba Barat di masa yg akan datang.

Sangat penting untuk memperhatikan dan meningkatkan akses bagi sektor potensial agar dapat dikelola secara maksimal dan memperlancar perekonomian di kabupaten Sumba Barat.

Menstimulasi sektor-sektor potensial yang dimiliki suatu daerah akan berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah daerah sehingga dapat mendorong sektor-sektor untuk menjadi sektor basis (Islamy, 2019) Ketepatan pemerintah dalam penganggaran yang tepat pada sektor potensial akan memberikan pengaruh positif bagi sektor lainnya secara langsung (Dewi & Yasa, 2020). Harapannya sektor-sektor tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah kabupaten Sumba Barat untuk mendorong pengelolaannya menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kinerja dan peran yang pada akhirnya meningkatkan sumbangsih terhadap pembentukan PDRB :

Tabel 2: Sektor Potensial berdasarkan hasil perhitungan analisis SLQ & DLQ, Shift Share dan Typologi Klassen di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-20 20

SLQ & DLQ	Shift Share	Typologi Klassen
1). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	1).Pertambangan dan Penggalian.	1). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
2). Real Estate.	2). Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.	2). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
3). Pertambangan dan Penggalian.	3). Transportasi dan Pergudangan.	3). Jasa lainnya
4). Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.	4). Informasi dan Komunikasi.	
5). Konstruksi.	5). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	
6). Transportasi dan Pergudangan.		
7). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.		
8). Jasa lainnya		

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

4.2 Analisis Skalogram

Berdasarkan Analisis Skalogram perhitungan ini dihitung berdasarkan banyak indikator fasilitas yang secara garis besar dikategorikan ke dalam indikator fasilitas pendidikan, indikator fasilitas kesehatan, dan indikator fasilitas perekonomian serta pengembangan sarana dan prasarana lainnya. Perhitungan dalam analisis ini dilakukan dengan menghitung kapasitas, pembobotan, standarisasi, dan kemudian hasil akhirnya adalah hierarki. Berikut merupakan hasil analisis kabupaten Sumba Barat tahun 2020 berdasarkan analisis skalogram :

Tabel 6 : Hasil Perhitungan berdasarkan analisis Skalogram di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

IPK	Jumlah Jenis Fasilitas	Hierarki	Nama Kecamatan
42.98	17	Hierarki1	Kota Waikabubak
18.97	19	Hierarki3	Loli
14.96	8	Hierarki3	Tana Righu
26.05	16	Hierarki1	Wanokaka
17.90	15	Hierarki3	Lamboya
7.09	7	Hierarki3	Lamboya Barat

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis skalogram diketahui bahwa wilayah dengan indeks perkembangan kecamatan (IPK) adalah kecamatan kota waikabubak dengan IPK sebesar 42,98 dengan jenis fasilitas sebanyak 17. Hal ini dikarenakan kecamatan kota waikabubak sendiri merupakan ibu kota dari kabupaten Sumba Barat, sehingga pusat pertumbuhan terutama untuk akses fasilitas dan aksesibilitas memang lebih terpusat dikota ini. Kemudian diikuti dengan kecamatan wanokaka dengan indeks perkembangan daerah sebesar 26,5 dengan jumlah jenis fasilitas sebesar 16. Berdasarkan analisis ini kecamatan ini unggul dengan jumlah fasilitas dan aksesibilitas terbesar kedua setelah kecamatan waikabubak.

Dengan demikian kedua kecamatan ini masuk dalam hierarki nomor satu sebagai wilayah pusat pertumbuhan di kabupaten

Sumba Barat. Sedangkan ke empat kecamatan lainnya yakni kecamatan Loli memiliki IPK sebesar 18,97 dan jumlah jenis fasilitas sebesar 19, kecamatan Lamboya memiliki IPK sebesar 17,90 dengan jumlah jenis fasilitas 15, kecamatan Tana Righu memiliki IPD sebesar 14,96 dengan jumlah jenis fasilitas 8 dan kecamatan Lamboya Barat memiliki IPD sebesar 7,09 dengan jumlah jenis fasilitas 7 masuk dalam hierarki tiga atau sebagai wilayah pendukung (Hinterland) di kabupaten Sumba Barat. Hasil analisis ini memberikan gambaran perkembangan masing-masing wilayah atau kecamatan di kabupaten Sumba Barat untuk pemerintah dapat meningkatkan dan mendorong kecamatan-kecamatan yang masih kurang dalam aksesibilitas dan fasilitas dalam mendorong indeks pembangunan manusia dan juga kelancaran aktivitas perekonomian, sehingga setiap kecamatan dapat berkembang dengan baik untuk meningkatkan pencapaiannya.

Beberapa penelitian terdahulu dengan metode serupa juga pernah dilakukan diantaranya di kabupaten Cilacap untuk mendapatkan gambaran wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya untuk mengetahui strategi yang tepat untuk melakukan pengembangan terhadap masing-masing wilayah (Pratomo, 2014) Penelitian serupa yakni dengan metode analisis skalogram ini juga pernah dilakukan di D.I Yogyakarta untuk menentukan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah yang menjadi wilayah pendukung atau hinterland yang dapat membantu melihat pencapaian masing-masing kabupaten/kota terhadap kesesuaian antara proyeksi dan hasil analisis, (Priyadi & Atmadji, 2017).

4.3 Analisis Keuangan

Daerah Analisis Keuangan Daerah bertujuan untuk melihat kemandirian daerah dalam menerapkan otonomi daerah sesuai ketentuan berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penguatan ekonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Analisis keuangan daerah sendiri terdiri atas Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Berikut merupakan hasil analisis Keuangan daerah kabupaten Sumba Barat tahun 2016-2020.

a. Rasio Kemandirian

Daerah Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan menggunakan data APBD, maka dapat kita ketahui kecenderungan perkembangan pengelolaan keuangan di Kabupaten Sumba Barat periode 2016-2020. Berikut merupakan tabel hasil analisis rasio kemandirian daerah Sumba Barat :

Tabel 7 : Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah berdasarkan Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Pengeluaran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan pemerintah pusat (pry+pinjaman) (%)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan		
1	2016	684.718.366	60.967.609	8,90	728.741.163	93,95	8,36	Instruktif
2	2017	691.828.977	85.144.270	12,30	634.684.707	91,73	13,41	Instruktif
3	2018	808.348.985	85.010.236	10,51	776.795.567	96,09	10,94	Instruktif
4	2019	801.027.022	97.313.775	12,14	733.559.140	90,32	13,44	Instruktif
5	2020	720.346.072	55.537.874	7,70	668.778.900	92,84	8,30	Instruktif
		Rata-rata	76.794.752	10,31	706.511.895,4	92,98	10,89	Instruktif

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Hasil analisis rasio keuangan daerah pada tabel 7 menunjukkan bahwa rasio keuangan daerah kabupaten Sumba Barat pada periode 2016-2020 masih sangat rendah dengan pola Instruktif. Hal dapat dilihat dari jumlah PAD yang lebih rendah (dengan rata-rata 10,31)% daripada bantuan pemerintah pusat serta pinjaman (dengan rata-rata 10,89). Hal ini berarti bahwa dominasi pemerintah pusat dalam membantu keuangan daerah masih sangat dominan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam PAD belum dapat dikelola dengan baik dan digali lebih dalam

oleh pemerintah daerah sehingga kurang menonjol.

Pengelolaan tersebut masih didominasi oleh pemerintah pusat yang kemudian diterima oleh daerah dalam bentuk dana perimbangan seperti; Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan penerimaan lainnya.

b. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan perhitungan analisis keuangan daerah perhitungan berikutnya adalah Rasio Ketergantungan Daerah. Besar nya tingkat ketergantungan daerah dapat dilihat dari besarnya jumlah pendapatan transfer dibandingkan dengan total pendapatan daerah

Tabel 8 : Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan berdasarkan Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Dana Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2016	728.741.163	684.718.366	106,4%
2017	634.684.707	691.828.977	91,7%
2018	776.795.567	808.348.985	96,9%
2019	723.559.140	801.027.022	90,3%
2020	668.778.900	720.346.072	92,8%
Rata-rata/tahun			95,6%

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan kabupaten Sumba Barat cukup mengalami fluktuasi pada periode tersebut. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan sangat tinggi yakni mencapai 106,4%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun tahun 2017 sebesar 91,7%. Meningkat lagi pada tahun berikutnya yakni 2018 sebesar 96,9%. Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 90,3%. Terakhir pada tahun 2020 meningkat menjadi 92,8%. Rata-rata rasio ketergantungan daerah dalam periode 2016-2020 yakni sebesar 95,6%. Angka ini menunjukkan bahwa rasio kateogoro kabupaten Sumba Barat masuk dalam kategori sangat tinggi dengan pola hubungan instruktif, yang berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maupun pihak luar lainnya sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan perhitungan rasio kemandirian yang sangat rendah.

c. Derajat Desentralisasi Fiskal

Perhitungan berikutnya dalam Analisis Keuangan Daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal bertujuan untuk mengetahui seberapa besar rasio kemampuan keuangan daerah terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat terhadap pemerintah provinsi NTT dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu perhitungan ini dihitung berdasarkan ukuran fiskal yakni membandingkan antara total pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

Tabel 9 : Hasil Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal berdasarkan Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan
2016	60.967.699	684.718.366	8,90	Sangat Kurang
2017	85.144.270	691.828.977	12,30	Kurang
2018	85.010.236	808.348.985	10,51	Kurang
2019	97.313.775	801.027.022	12,14	Kurang
2020	55.537.874	720.346.072	7,70	Sangat Kurang
Rata-rata/tahun			10,31	Kurang

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kemampuan keuangan daerah Sumba Barat masih sangat kurang karena berada diantara interval 0,00%-10,00% yakni sebesar 8,90%. Kemudian pada 3 tahun berikutnya meningkat masuk dalam kategori kurang karena berada diantara interval 10,01%-20,00% yakni 12,30 pada tahun 2017, 10,51% pada tahun 2018, dan 12,14% pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan kembali masuk kedalam kategori sangat kurang karena berada di interval 0,00%-10,00% yakni sebesar 7,70%. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah mewabahnya virus covid 19 yang menghantam sektor ekonomi.

d. Indeks Pengeluaran Rutin

Perhitungan berikutnya dalam analisis keuangan daerah adalah Indeks Pengeluaran Rutin. Indeks Pengeluaran Rutin sendiri terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi (baik untuk daerah

otonom maupun perusahaan), belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Indeks pengeluaran rutin merupakan salah satu indikator dalam menilai kemampuan daerah kabupaten Sumba Barat dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Tabel 10 : Hasil Perhitungan Indeks Pengeluaran Rutin berdasarkan Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pengeluaran Rutin (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan
2016	60.967.609	789.708.772	7,72	Sangat Kurang
2017	85.144.270	719.828.977	11,82	Kurang
2018	85.010.236	861.805.803	9,86	Sangat Kurang
2019	97.313.775	820.912.915	11,85	Kurang
2020	55.537.874	732.285.580	6,76	Sangat Kurang
	Rata-rata	784.908.409,4	9,6	Sangat Kurang

Sumber : Hasil analisis penulis, 2022

Hasil perhitungan pada tabel 9 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan hanya berkisar di antara kategori yakni sangat kurang dengan interval (0,00-10,00) yakni pada tahun 2016 (7,72%), 2018 (9,86%) dan 2020 (6,76) dan kategori kurang dengan interval 10,01-20,00 yakni pada tahun 20167 (11,82%) dan tahun 2019 (11,85%) dengan rata-rata sebesar 9,6%. Hal ini berarti bahwa kemampuan keuangan Sumba Barat masih rendah dan tidak cukup kuat untuk membiayai pembangunannya sendiri. Hal ini terlihat dari perbandingan nilai Indeks Pengeluaran Rutin yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai PAD.

Hal ini juga berarti pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat sebagai sumber keuangan. Penelitian serupa dengan metode analisis keuangan daerah sebelumnya juga pernah dilakukan di beberapa daerah lainnya seperti di Jayapura, dimana hasil penelitian ini juga menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah Jayapura yang masih sangat rendah dan bergantung kepada pemerintah pusat. Namun meski begitu tingkat efektifitas dan efisiensi dari penerimaan dan pengelolaan PAD Jayapura terbilang cukup baik meskipun pengelolaannya belum maksimal (Efendi Jikwa, Agustinus Salle, 2005).

Berdasarkan hal tersebut hal serupa juga terjadi Sumba Barat namun perbedaannya adalah Jayapura sedikit lebih baik untuk PAD nya sedangkan rasio kemandirian, tingkat ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal dan indeks pengeluaran rutin Sumba Barat sangat rendah dengan pola konstruktif dan tingkat penerimaan dan pengelolaan PAD nya juga masih sangat kurang. Hal ini mengindikasikan tidak adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan PAD. Sedangkan dalam penelitian lainnya yang dilakukan di provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang cukup baik yakni dimana tingkat kemandiriannya berada di angka 63% yang berarti berada di tingkat kemandirian sedang dengan pola hubungan partisipatif dan peranan pemerintah pusat yang semakin berkurang. Meskipun tingkat ketergantungan masih tergolong tinggi namun kontribusi PAD nya masih cukup baik yakni di interval 35,2% atau dalam skala yang cukup mampu namun harus tetap ditingkatkan (Wokas, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka Pengelolaan keuangan daerah dan PAD kabupaten Sumba Barat harus benar-benar diperhatikan dengan baik yakni dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan di kabupaten Sumba Barat periode tahun 2016-2020 telah diketahui bahwa hanya terdapat 3 sektor unggulan. Selain itu juga diketahui 11 sektor lainnya memiliki peluang untuk berreposisi menjadi sektor unggulan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu penting mempertimbangkan sektor-sektor tersebut dan menjadi prioritas.

Berdasarkan analisis skalogram telah diketahui wilayah yang menjadi pusat

pertumbuhan yakni Kota Waikabubak dan Kecamatan Wanokaka, hasil ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan untuk pemerintah agar melakukan pemerataan akses fasilitas dan aksesibilitas di kecamatan lainnya yakni kecamatan Loli, Tana Righu, Lamboya, dan Lamboya Barat sehingga pemerataan pembangunan ekonomi dapat dicapai diseluruh wilayah. Berdasarkan analisis keuangan daerah dengan 5 indikator yang telah dihitung menunjukkan bahwa semuanya berada di kategori sangat kurang dan kurang dengan pola hubungan instruktif.

Hal ini berarti tingkat ketergantungan kabupaten Sumba Barat kepada pemerintah pusat dan pihak luar lainnya masih sangat tinggi meski mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yakni 2011-2015 sebesar 6,8% meningkat menjadi 10,89% di periode 2016-2020.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka Sumba Barat membutuhkan strategi pengembangan ekonomi daerah yang mumpuni yang bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan, mencapai stabilitas perekonomian, dan pemerataan pembangunan. Berikut merupakan beberapa strategi pembangunan yang bisa diterapkan oleh pemerintah kabupaten Sumba Barat yakni

1. Melalui kebebasan yang telah diberikan melalui otonomi daerah maka kabupaten Sumba Barat dapat kembali meninjau dan mengembangkan potensi sektor-sektor potensial yang telah diketahui sebelumnya berdasarkan analisis sektor unggulan sehingga dengan menjadikan sektor potensial tersebut sebagai prioritas dapat mendorong peningkatan perekonomian terutama sektor-sektor yang memiliki rasio pertumbuhan cukup baik dan memiliki peluang untuk dapat meningkat penyerapan tenaga kerja dimasa yang akan datang namun tidak dapat dikelola dengan baik.

2. Untuk dapat mengembangkan sektor-sektor potensial tersebut maka penting untuk dapat melakukan kajian yang mendalam terkait keunggulan komparatif/kompetitif yang dimiliki kabupaten Sumba Barat berdasarkan ketersediaan bahan baku disertai dengan SDM yang kreatif. Pengkajian keunggulan kompetitif ini didasarkan pada beberapa unsur penting seperti kreatifitas, teknologi, dan kualitas sumberdaya manusia, kolaborasi ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan produk dengan nilai dan daya saing yang tinggi.
3. Strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat adalah dengan memperhatikan potensi masing-masing kecamatan sebagai modal yang paling dasar untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas untuk menunjang setiap kegiatan perekonomian pada masing-masing sektor. Tujuannya agar mendorong kecamatan-kecamatan lainnya di kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah-wilayah pusat pertumbuhan yang baru juga untuk mengurangi ketimpangan lokal.

Pemerintah kabupaten Sumba Barat juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber yang potensial di daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi agar dapat meningkatkan rasio kemandirian daerahnya. Melalui intensifikasi diantaranya dengan melakukan pembaharuan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi. Sedangkan secara ekstensifikasi dapat

dilakukan dengan identifikasi terhadap potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk memunculkan berbagai peluang baru sebagai sumber pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindikasari, E., Thereza Br. Saragih, M., Ali Shariati, I., Sofyan, S., Al Baihaqi, R., & Nooraeni, R. (2020). Klasifikasi Kabupaten Tertinggal di Kawasan Timur Indonesia dengan Support Vector Machine. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(3), 188–195. <https://doi.org/10.33387/jiko.v3i3.2364>
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01), 1–37.
- Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 15(1), 52–60. <https://doi.org/10.4103/2276-7096.188531>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. 2021. [Seri 2010] Laju Pertumbuhan C to C PDRB Kabupaten Sumba Barat ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2021. [Seri 2010] Laju Pertumbuhan C to C PDRB Provinsi NTT ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. 2021. [Seri 2010] PDRB Kabupaten Sumba Barat ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2021. [Seri 2010] PDRB Provinsi NTT ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2021. [Seri 2010] Realisasi Penerimaan Kabupaten Sumba Barat Menurut jenis Penerimaan, 2016-2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2021. [Seri 2010] Realisasi Pengeluaran Kabupaten Sumba Barat Menurut jenis Pengeluaran, 2016-2021
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. 2021. Publikasi Masing-Masing Kecamatan/Kota dalam Angka, 2020.
- Dethan, S. H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009-2013. *GaneÇ Swara*, 9(2), 145–151. <http://unmasmataram.ac.id/2015/09/05/25-stevany-2/>
- Efendi Jikwa, Agustinus Salle, P. K. A. L. (2005). *ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA*. 2(2), 1–15.
- Filipus, T. L. T. M. M. R. (2019). *Analisis Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanan di Minahasa Utara*. 6(1), 14–23.
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. In *2018* (Kedua). CV. Nur Lina.
- Islamy, N. (2019). Analisis Sektor Potensial, Dapatkah Pariwisata Menjadi Lokomotif Baru Ekonomi Nusa Tenggara Barat?. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 1-10.
- Kroll, C., Warchold, A., & Pradhan, P. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs): Are we successful in turning trade-offs into synergies? *Palgrave Communications*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-019->

0335-5

- Ndaparoka, D. S. R. (2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi *Jaka-Jurnal Jurusan Akuntansi*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/268045205.pdf>
- Prahardika, M. A. (2015). *ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN GRESIK*.
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87–100.
<https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344>
- Pratomo, A., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2014). *ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN CILACAP*. 3(1), 13–27.
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ajie*, 2(2), 193–219.
<https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art9>
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., ... & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan* (R. Atrianthos (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Sihombing, F. N. (2018). Identifikasi Pangan Unggulan Di Kota Medan: Location Quotient Dan Dynamic Location Quotient. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 6(2), 91–94.
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 179–191.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/804>
- Wokas, H. R. N. (2020). *Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014-2018*. 2(1), 10–22.
- Yonatan, Fitriyah, N., & Margono, A. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *E-Journal Administrative Reform*, 2(4), 2620–2632.